

**PENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF  
DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP  
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN.  
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD KOTA DUMAI)**

Oleh :

**Bayu Yosa Baskara**

**Pembimbing : Azwir Nasir dan Devi Safitri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [bayuyosa@gmail.com](mailto:bayuyosa@gmail.com)

Preventive Monitoring, Detective Monitoring and Performance Based  
Budgeting on Effectiveness Budgetary Control (*The empirical study  
on the Lokal Government Unit District at Dumai*)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Effects of Preventive Monitoring, Detective Monitoring, and Performance-Based Budgeting on Effectiveness Budgetary Control survey on the Lokal Government Unit (SKPD) district at Dumai of Riau Province as the research object. The population used in this study was 33 on the Lokal Government Unit (SKPD) at Dumai city of Riau Province. Sample in this research used the purposive sampling. The sample is head of department, head of division/secretary, and head of subsection. The amount of respondent in this research was 99, only 87 copy questionnaires can be processed. This type of data is the primary data with collection method with questionnaires. The analysis data techniques using Structural Equation Model (SEM) with the help smartPLS ver. 3.0 was used to test whether independent variables affect dependent variables. The result of this study indicate that the variable of preventive monitoring, detective monitoring and Performance-Based Budgeting is influence the effectiveness budgetary control. The result also showed the contribution of preventive monitoring, detective monitoring, and performance-based budgeting on effectiveness Budgetary Control is equal 82,4%. While the remaining 17,6% is influenced by other variables not included in this smartPLS model.*

*Keywords : Effect of Preventive Monitoring, Detective Monitoring, Performance Based Budgeting and Effectiveness Budgetary Control*

**PENDAHULUAN**

Pada saat ini perkembangan ekonomi Indonesia sangat pesat, maka dari itu menuntut adanya kemampuan manjerial untuk mengalokasikan sumber daya secara

efektif dan efisien. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau

dikenal dengan istilah Good Governance.

Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab. Apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi publik akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang professional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money (effectivity, efficiency, economy)* (Mardiasmo, 2004).

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2010). Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Menurut Sugiharto (2007), pengalokasian dana/anggaran yang efektif yaitu setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategik yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategik daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien berarti pencapaian sasaran dan tujuan strategik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian pada anggaran adalah sistem penganggaran yang berbasis

kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pada penganggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diperinci dalam bentuk indikator kinerja yang merupakan target prestasi kerja dari pengelola.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya (Fajri, 2009). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000). Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penatausahaan kas Pemerintah

Kota Dumai kurang memadai; (2) Aset Lainnya - Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya; (3) Kesalahan penganggaran pada empat SKPD; (4) Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum memadai; dan (5) Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pelaksanaan paket pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN Wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat tidak sesuai kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan; (2) Terdapat penggunaan atas penerimaan retribusi Terminal Barang; dan (3) Jaminan Pelaksanaan tidak melindungi periode Perjanjian Kerjasama dan dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran. ([www.pekanbaru.bpk.go.id](http://www.pekanbaru.bpk.go.id))

Pengawasan menurut sifatnya dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Variabel pertama yang diteliti adalah pengawasan preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan (Revrison, 2000).

Fajri (2009) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran diantaranya, Arif Fuadi (2013), dan Julio Herdi Peuranda (2014) menyimpulkan bahwa Pengawasan Preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dafitra Pratama (2014), Jaka Hendrawan (2014), dan Lilik Singgih Nugroho (2016) mendapatkan hasil yang berlawanan dimana Pengawasan Preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Variabel kedua yang diteliti adalah Pengawasan Detektif. Revrison (2000) menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan atau kegiatan, yaitu dengan

membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menurut teori dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada, dan tentu saja hal itu dilakukan setelah anggaran dipakai dan digunakan, yang mana pengawasan ini sangat penting dilakukan karna memiliki tujuan untuk memeriksa apakah penggunaan anggaran telah digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketetapan.

Penelitian-penelitian trdahulu tentang pengawasan detektif diantaranya, Arif Fuadi (2013), Dafitra Pratama (2014), Jaka Hendrawan (2014), dan Julio Herdi Peuranda (2014) menyimpulkan bahwa Pengawasan Detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Variabel ketiga yang diteliti adalah Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil dalam

pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan (Dafitra, 2014). Penganggaran berbasis kinerja sangat penting demi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta efektifitas dalam jalannya anggaran.

Penelitian terdahulu tentang Penganggaran Berbasis Kinerja diantaranya, Rahmatulloh (2010), Riskawati Salawali (2014), Jaka Hendrawan (2014), dan Lilik Singgih Nugroho (2016) menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dafitra Pratama (2014) menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013), dengan judul “Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Bukit Tinggi)”. Perbedaan Penelitian ini dengan sebelumnya:

Yang Pertama, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah

Kota Dumai. Perbedaan lokasi ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan.

Yang kedua, penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan variabel independen Pengaruh Pengawasan preventif dan Pengawasan Detektif, sedangkan penelitian ini menambah variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (Nugroho, 2016) sebagai perluasan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif, dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai)”.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Pengawasan Preventif berpengaruh terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai? 2) Apakah Pengawasan Detektif berpengaruh terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai? 3) Apakah Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai?

Adapun tujuan penelitiannya ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai 1) Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai. 2) Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai. 3) Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja

terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, diantaranya: 1) Bidang Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan teori mengenai Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif, dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran pada SKPD Kota Dumai. 2) Bidang Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah pada umumnya dan pemerintah daerah Kota Dumai pada khususnya dalam meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Efektifitas Pengendalian Anggaran**

Pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran (Pratama, 2014). Faktor penentu

efektifitas suatu anggaran dilihat dari segi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran
- b. Fleksibilitas dalam fiskal
- c. Tingkat pengeluaran yang diharapkan
- d. Fasilitas dalam pemberlakuan tingkat pajak
- e. Batasan proses anggaran
- f. Waktu dan informasi
- g. Manajemen keuangan
- h. Waktu yang salah dalam melepaskan dana
- i. Biaya yang terlalu besar
- j. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan dana
- k. Hambatan sumber daya manusia.

Diketahui bahwa anggaran juga memiliki fungsi sebagai:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik.
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan

negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000).

Efektivitas pengendalian anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian). Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

### **Pengawasan Preventif**

Pengertian pengawasan menurut Fuadi (2013) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

Porter (1992) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara

tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

### **H<sub>1</sub>: Pengawasan Preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran**

#### **Pengawasan Detektif**

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pem-biayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Revrisond (2000) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

### **H<sub>2</sub>: Pengawasan Detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.**

#### **Penganggaran Berbasis Kinerja**

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah

sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2010). Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi, misi dan rencana strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

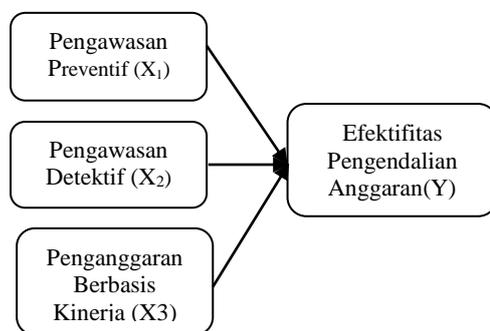
Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara *input*, *output* dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab (*akuntability*) dan keterbukaan (*transparancy*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

### H<sub>3</sub>: Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

#### Model Penelitian

Pengaruh antara pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu sebulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai, yang berjumlah 26 SKPD ditambah dengan seluruh Kecamatan yang ada di Kota Dumai berjumlah 7 Kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden yang menjadi anggota sampel. Pengumpulan data diperoleh dengan

cara memberikan kuesioner (*mail questioner*), yang berisi daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Kriteria yang ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang beroperasi di Kota Dumai
2. Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Badan/Dinas/Instansi, Sekretaris/Kabid/Kabag dan Kasubid/Kasubbag yang minimal sudah menjabat selama 1 tahun.

Metode analisis data dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. *Partial Least Square* adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2013) tujuan PLS adalah membantu penelitian untuk prediksi. Model formatnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dalam penelitian ini disebar pada 33 SKPD yang ada di Kota Dumai. Dari total 99 kuesioner yang kembali sebanyak 87 kuesioner (87,87%). Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 kuesioner (12,12%).

#### Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan

menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada tabel yang disajikan.

**Tabel 1**  
**Hasil *Bootstrapping***

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	t statistics	p value
PP -> EPA	0,347	0,362	0,167	2,080	0,038
PD -> EPA	0,331	0,301	0,157	2,109	0,035
PBK -> EPA	0,254	0,270	0,167	2,021	0,044

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2016

### Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

#### Pengaruh Pengawasan Preventif dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hasil pengujian hipotesis 1 ini dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Pengawasan Preventif (PP) dengan Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,347 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,080. Nilai tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

#### Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian

anggaran. Hasil pengujian hipotesis 2 ini dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Pengawasan Detektif (PD) dengan Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,331 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,109. Nilai tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa penerapan pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

#### Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hasil pengujian hipotesis 3 ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dengan Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,254 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,021. Nilai tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 3 diterima**.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas

pengendalian anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan preventif, maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya penerapan pengawasan detektif, maka pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai semakin efektif.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya penganggaran berbasis kinerja, maka akan semakin efektif pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai.

#### **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran untuk peneliti selanjutnya bahwa :

1. Sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai

dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti metode interview untuk mendapatkan komunikasi dua arah dan mendapatkan kejujuran jawaban responden.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambah beberapa variabel independen lain yang diduga juga dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Fajri. (2009). *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Vol. 1 No. 2
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Fuadi, Arif. (2013). *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. (Studi Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Vol. 1 No. 1
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Partial Least Square*, Edisi kedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hendrawan, Jaka. (2014). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran* (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pelalawan). Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Vol.1 No.2
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Munandar. (2010). *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Nugroho, Lilik Singgih. (2016). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah( Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Grobogan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peuranda, Julio Herdi. (2014). ). *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*.(Studi Empiris pada SKPD Kampar). Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Vol.1 No.2
- Porter, Thomas, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- Pratama, Dafitra. (2014). ). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran* (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pelalawan). Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Vol.1 No.2
- Rahmatullah. (2010). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan*. [Online]. Tersedia: <http://kotakpemikiranrahmatulloh.blogspot.com>
- Revrison, Baswir. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
- Salawali, Riskawati. (2013). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
- Sugiharto, dkk. 2007. *Ekonomi Mikro (sebuah kajian komprehensif)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

([www.pekanbaru.bpk.go.id](http://www.pekanbaru.bpk.go.id))